



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIE ANDRASYAH ISA**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **809546**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 916.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 13 m²/10 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m²/83 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 306.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 269.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT AFX12U21C08 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH AT GR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
3. MOTOR, HONDA AT11I21B01 AT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.240.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 127.521.211**F. HARTA LAINNYA** Rp. 113.500.000

Sub Total Rp. 1.471.561.211

III. HUTANG Rp. 138.982.500**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.332.578.711

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.